

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Minta Pembayaran Lahan Proyek APBN

SAMBAS - Adi Fitriansyah, Warga Dusun Sukamantri Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas terpaksa membentangkan baliho di pagar pintu masuk sarana dan prasarana pengolahan air baku di Desa Semantir Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas yang merupakan proyek yang bersumber dari APBN.

Aksinya dilakukan, karena dirinya yang memiliki itikad baik membantu Pemkab Sambas, yakni dengan membebaskan lahan yang diperlukan agar proyek pembangunan sarana dan prasarana air baku yang didanai APBN murni tersebut bisa dilaksanakan di Kabupaten Sambas.

"Saya terpaksa melakukan ini (membentangkan baliho dipintu masuk fasilitas tersebut), karena dari 2018 hingga sekarang, Pemkab Sambas belum membayarkan tanah yang sudah saya bebaskan, sementara gedung sudah jadi. Saya sudah ditekan kawan-kawan yang juga terlibat juga dalam pembebasan lahan tersebut," kata Adi, lumat (11/2),

Diceritakan Adi, berawal di

2014, PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas yang saat itu dijabat Almarhum Asriadi. Mengajukan proposal pembangunan sarpras air bakuke Jakarta (pusat). Upaya yang dilakukan berhasil, sehingga di 2017, proyek tersebut bisa dikerjakan di sambas. Tetapi dengan catatan, pusat mewajibkan Pemkab Sambas untuk menyanggupi sejumlah hal, termasuk menyediakan Jahan. Sebagai upaya memenuhi apa yang diminta pusat, pada 2016 ada surat pernyataan kesediaan menyiapkan lahan yang ditandatangani Bupati Sambas yang saat itu dijabat H Atbah Romin Suhaili LC, dimana Pemkab Sambas bersedia menyiapkan lahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air baku tahun anggaran 2017 dengan sumber dana dari APBN murni.

Begitu juga di 2017, Bupati Sambas (H Atbah Romin Suhaili) mengeluarkan Surat pernyataan Kesanggupan Nomor 500/046/Ekon-SDA/2017, Dalam surat tersebut Pemkab Sambas menyanggupi mengurus penyiapan perizinan untuk

pemanfaatan kawasan hutan lindung, sanggup dalam mengurus perizinan untuk pemanfaatanair permukaan, sanggupuntuk melaksanakan perjanjian kerja sama antara pemerintah pusat dan dan pemkab Sambas. Sanggupdalam status penyediaan lahan, serta kesanggupan lainnya,

Namun saat itu ada beberapa kendala di lapangan, "Kendala yang krusial pada saat itu adalah pembebasan tanam tumbuh masyarakat yang tanahnya terkena galian

untuk pemasangan pipa dan pembebasan tanah untuk pembangunan lokasi reservoar," katanya. Adi juga menambahkan, "Dalam pembebasan tanam tumbuh, dirinya juga dilibatkan. Termasukada juga melakukan pembayaran tanaman yang terdampak pekerjaan ini dan uang saya

tidak dikembalikan. Dan saat itu saya menekankan kepada Pemkab Sambas, untukmembayar tanah yang sudah saya bebaskan demi kelancaran proyek tersebut," katanya.

Dimana tanah yang diperlukan, sudah Adi bebaskan di 2018, karena ingin membantu Pemkab Sambas dalam penyediaan air bersih. "Berjalannya waktu, hingga gedungtersebutsudah dibangun, saya meminta kepada Pemkab untuk bisa membayar tanah yang sudah saya bebaskan baik secara lisan serta tertulis," katanya. Pada 4 Mei 2020, Adi sudah berkirim surat kepada Bupati Sambas, yang saat itu masih dijabat H Atbah Romin Suhaili Lc,

terkait permohonan pembayaran 50 persen biaya pembebasan lahan untuk lokasi sarana pengolahan air baku di Desa Semantir. Dimana Adi mengajukan permohonan pembayaran panjar 50 persen dari nilai lahan yang sudah dibebaskannya bersama dengan rekan-rekannya, dengan luas areal 1.672 M2 dengan nilai harga jual Sebesar Rp250.800.000x50 persen, yakni Rp125.400.000.

Belum ada juga titik temu, somasi dikirimkan Adi pada 19 Oktober 2020. Dimana dirinya mengharapkan ada komitmen pihak terkaitumuk segera melakukan pembayarantanah yang sudah dirinya bebaskan demi kelancaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air baku.

"Terakhir pada 6 Januari 2022, saya melayangkan somasi kembali ke Pemkab Sambas. Terlebih, saya didesak kawankawan yang dananya dipakai untuk membebaskan lahan," katanya.

Bahkan saat itu, Pemkab Sambas meminta dirinya membuatkan sertifikat tanah, yang kemudian itupun ditindaklanjuti dengan mengajukan SK pemberian Hak

Milik Perorangan ke BPN Kabupaten Sambas. Tetapi surat tersebut belum juga selesai hingga sekarang. "Kalau kendalanya disertifikattanah, karena ini proyek pemerintah dan niat saya adalah membantu pemerintah, harusnya dibantu dong. Supaya cepat terbitnya sertifikat," katanya.

Mengenai hal ini, koran ini mencoba melakukan konfirmasi ke Sekda Kabupaten Sambas, H Fery Madagaskar. Dirinya pun menyarankan untuk ke Dinas Perkim LH Kabupaten Sambas. "Tanya ke Perkim LH yang tahu," kata Sekda, Jumat (11/2).

Koran ini selanjutnya menanyakan ke Perkim LH, yakni mantan Kepala Dinasnya yakni Eko Susanto yang sekarang menjabat Staf Ahli Bupati Sambas. Dirinya menyebutkan karena ini kegiatan APBN, pembebasan lahan ranahnya ada di PUPR Kabupaten Sambas.

"PUPR, Itukegiatan APBN," katanya. Sementara, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sambas, DRH Sabib, ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut, hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan. (fah)